

**TESIS**  
**ANALISIS KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP INDIKATOR  
EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**ANALYSIS OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT ON ECONOMIC  
INDICATORS IN SOUTH SULAWESI PROVINCE**

disusun dan diajukan oleh:  
**VARIAN VALIANT ERVIC MANGUMA**  
**A052211001**



**MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**TESIS**

**ANALISIS KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP INDIKATOR  
EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**ANALYSIS OF PEOPLE'S BUSINESS CREDIT ON ECONOMIC  
INDICATORS IN SOUTH SULAWESI PROVINCE**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister

disusun dan diajukan oleh:  
**VARIAN VALIANT ERVIC MANGUMA**  
**A052211001**



**MAGISTER EKONOMI SUMBER DAYA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**  
**ANALISIS KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP INDIKATOR EKONOMI**  
**DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun oleh

**VARIAN VALIANT ERVIC MANGUMA**  
**A052211001**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister **Ekonomi Sumber Daya** Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
Pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marsuki, DEA.  
NIP. 19600626 198803 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., MA.  
NIP. 19660811 199103 2 001

Ketua Program Studi Magister  
Ekonomi Sumber Daya



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si.  
NIP. 19770913 200212 2 002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.  
NIP. 19640205 198810 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Varian Valiant Ervic Manguma

NIM : A052211001

Program Studi : Magister Ekonomi Sumber Daya

Menyatakan dengan yang sebenar-benarnya bahwa Karya Tulis yang saya ajukan sebagai persyaratan menyelesaikan studi pada Program Magister Ekonomi Sumber Daya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin adalah benar-benar karya asli sendiri bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Saya akan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan baik secara pribadi maupun sanksi secara hukum yang berkaitan dengan karya tulis saya.

Makassar, 28 Desember 2023



Varian Valiant Ervic Manguma

## KATA PENGANTAR

**Syalom, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.... Salam Bahagia...**

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "***Analisis Kredit Usaha Rakyat Terhadap Indikator Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan***" dapat terselesaikan dengan baik yang sekaligus menjadi tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Ekonomi Sumber Daya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari selama proses penyusunan tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki sehingga penulis terbuka, dengan senang hati menerima saran dan kritikan yang dapat membangun untuk perbaikan karya tersebut kedepannya. Terwujudnya penyelesaian tesis ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan, terutama kepada orang tua penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu, Bapak Victor Manguma dan Ibu Since Erna Lamba yang telah memberikan dukungan, nasehat seta doanya dalam menyelesaikan studi. Semoga penulis juga dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua.

Begitu pula saya ucapkan terima kasih kepada adik penulis satu-satunya Devin Dave Ervic Manguma yang sudah ikut mendukung, membantu serta mendoakan dalam selama proses penulisan dan seluruh keluarga besar saya tercinta.

Selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut andil dalam menyelesaikan studi penulis, teruntuk kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta seluruh Staf.
3. **Prof. Dr. Marzuki, DEA.** selaku pembimbing I yang telah memberikan waktunya bagi penulis, pengalaman, ilmu dan pengetahuan selama penulis proses penyusunan tesis.
4. **Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., MA.** selaku pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya bagi penulis dan dengan sabar membimbing penulis sampai selesai serta memberikan pengalaman, ilmu dan pengetahuan selama proses penyusunan tesis.
5. Tim penguji Bapak **Dr. Muhammad Yusri Zamhuri, MA.** Bapak **Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM** dan Ibu **Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si** yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam memperbaiki tesis ini.
6. Seluruh dosen program studi Ilmu Ekonomi dan pascasarjana Ekonomi Sumber Daya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan segudang Ilmu kepada penulis.

7. Bapak dan ibu pegawai beserta staf akademik pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas memberikan pelayanan untuk setiap pengurusan berkas proses penyelesaian studi di Magister Ekonomi Sumber Daya.
8. Teman-teman seperjuangan di Magister Ekonomi Sumber Daya angkatan tahun 2021, **Adinda Asiah Minhikmah Alena Pituleng Yunus SE, M.Si., Andi Zakinah Juniarti SE, M.Si., Sri Handila SE, M.Si., Wafiqah Ulya SE, M.Si., Andi Nur Wahyuningsih SE, M.Si., Rani Handayani SE, M.Si., Anggy Khusnul Khatima SE, M.Si., Dirmansyah Darwin SE, M.Si., Nursyamsu M.Si., Hasbullah SE, M.Si.** yang sama-sama menimbah ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terima kasih karena telah mengisi hari-hari penulis dengan suka dan duka sehingga penulis merasakan kebersamaan dan kekompakan serta saling mendukung dalam hal kebaikan.
9. Terima kasih kepada Bapak **Darwisman** selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan data terkait penelitian sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih Kepada Bapak **Causa Iman Karana** selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan data terkait penelitian sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun membantu dalam proses penyelesaian tesis ini, terima kasih sebesar-besarnya.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan terkhusus bagi para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Makassar, 21 Desember 2020



Varian Valiant Ervic Manguma

## ABSTRAK

VARIAN VALIANT ERVIC MANGUMA. *Analisis Kredit Usaha Rakyat terhadap Indikator Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Marsuki dan Sri Undai Nurbayani).

Penelitian ini bertujuan melihat dampak kredit usaha rakyat terhadap indikator-indikator ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan menganalisis persinggungan antara tren KUR dengan tren pengangguran, kemiskinan, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada wilayah Ajatappareng penyaluran KUR tidak berdampak bagi pengangguran. Akan tetapi, KUR berdampak pada kemiskinan, kecuali di Kota Pare-Pare dan di Kabupaten Enrekang. Lain halnya dengan KUR yang berdampak pada pendapatan per kapita di seluruh kabupaten di wilayah Ajatappareng. Adapun KUR tidak berdampak pada wilayah Ajatappareng, kecuali Kabupaten Barru.

Kata kunci: Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengangguran, kemiskinan, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi



## ABSTRACT

VARIAN VALIANT ERVIC MANGUMA. *An Analysis of People's Business Credit on Economic Indicators in South Sulawesi Province* (supervised By Marsuki and Sri Undai Nurbayani).

The aim of this research is to see the impact of people's business credit on economic indicators in South Sulawesi Province. This study analyzed the intersection between KUR trends and trends in unemployment, poverty, per capita income, and economic growth. One of the results of this study shows that in Ajatappareng region, KUR distribution has no impact on unemployment, but KUR has an impact on poverty except for Pare-Pare City and Enrekang Regency. It is different from KUR which has an impact on per capita income in all districts in Ajatappareng region, while KUR has no impact on Ajatappareng area except for Barru Regency.

Keywords: people's business credit (KUR), unemployment, poverty, per capita income, economic growth, economic indicators, South Sulawesi



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
HALAMAN JUDUL.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
ABSTRAK.....	9
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	14
DAFTAR TABEL.....	18
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	20
1.1 Latar Belakang.....	20
1.2 Rumusan Masalah .....	26
1.3 Tujuan Penelitian .....	26
1.4 Manfaat Penelitian .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	28
2.1 Konsep Kredit .....	28
2.2 Kredit UMKM .....	31
2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	32
2.4 Pengangguran .....	35
2.5 Kemiskinan .....	38
2.6 Pendapatan Per Kapita.....	40
2.9 Tinjauan Empiris dan Hasil penelitian.....	42
<b>BAB III KERANGKA PIKIR</b> .....	44
3.1 Kerangka Konsep .....	44
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	48
4.1 Rancangan Penelitian.....	48
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
4.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	49
4.3.1 Jenis Data.....	49
4.3.2 Sumber Data.....	49

4.4	Metode Pengumpulan Data.....	50
4.5	Definisi Operasional.....	51
4.6	Metode Analisis Data.....	51
<b>BAB V Hasil dan Pembahasan.....</b>		<b>55</b>
5.1	Gambaran Umum.....	55
5.1.1	Kondisi Geografis.....	55
5.1.2	Kondisi Perekonomian.....	57
5.2	Dekripsi Variabel Penelitian.....	58
5.3	Pembahasan dan Penelitian.....	61
5.3.1.	<b>Analisis Hubungan KUR Terhadap Indikator Ekonomi</b>	
	<b>Kabupaten/Kota Wilayah Ajatappaeng.....</b>	<b>61</b>
1.	Kabupaten Sidrap.....	61
2.	Kabupaten Barru.....	67
3.	Kabupaten Pinrang.....	72
4.	Kabupaten Pangkep.....	78
5.	Kabupaten Enrekang.....	83
6.	Kota Pare-Pare.....	88
5.3.2	<b>Analisis Hubungan KUR Terhadap Indikator Ekonomi</b>	
	<b>Kabupaten/Kota Wilayah Mamminasata.....</b>	<b>94</b>
1.	Kota Makassar.....	94
2.	Kabupaten Takalar.....	99
3.	Kabupaten Gowa.....	104
4.	Kabupaten Maros.....	108
5.3.3	<b>Analisis Hubungan KUR Terhadap Indikator Ekonomi</b>	
	<b>Kabupaten/Kota Wilayah Luwu Raya dan Toraja.....</b>	<b>114</b>
1.	Kabupaten Luwu Utara.....	114
2.	Kabupaten Luwu.....	119
3.	Kabupaten Tana Toraja.....	124
4.	Kabupaten Luwu Timur.....	129
5.	Kabupaten Toraja Utara.....	134
6.	Kota Palopo.....	139

<b>5.3.4. Analisis Hubungan KUR Terhadap Indikator Ekonomi</b>	
Kabupaten/Kota Wilayah Bosowa.....	144
1. Kabupaten Bone.....	144
2. Kabupaten Soppeng.....	149
3. Kabupaten Wajo.....	154
<b>5.3.5 Analisis Hubungan KUR Terhadap Indikator Ekonomi</b>	
Kabupaten/Kota Wilayah Selatan.....	160
1. Kabupaten Selayar.....	160
2. Kabupaten Jeneponto.....	165
3. Kabupaten Bantaeng.....	170
4. Kabupaten Bulukumba.....	175
5. Kabupaten Sinjai.....	180
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>185</b>
<b>6.1. Kesimpulan.....</b>	<b>185</b>
<b>6.2. Saran.....</b>	<b>186</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>188</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>191</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Kerangka Konsep Penelitian .....	47
<b>Gambar 5.1</b> Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 .....	54
<b>Gambar 5.2</b> Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Sidrap Tahun 2017-2021 .....	61
<b>Gambar 5.3</b> Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sidrap Tahun 2017-2021 .....	63
<b>Gambar 5.4</b> Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Sidrap Tahun 2017-2021 .....	64
<b>Gambar 5.5</b> Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021 .....	67
<b>Gambar 5.6</b> Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021 .....	68
<b>Gambar 5.7</b> Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021 .....	69
<b>Gambar 5.8</b> Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021 .....	73
<b>Gambar 5.9</b> Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021 .....	74
<b>Gambar 5.10</b> Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Ekonomi Di Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2021 .....	75
<b>Gambar 5.11</b> Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2021 .....	78
<b>Gambar 5.12</b> Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2021 .....	79
<b>Gambar 5.13</b> Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Pangkep Tahun 2017-2021 .....	80
<b>Gambar 5.14</b> Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021 .....	83
<b>Gambar 5.15</b> Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021 .....	84
<b>Gambar 5.16</b> Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021 .....	85
<b>Gambar 5.17</b> Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kota Pare-Pare Tahun 2017-2021 .....	88
<b>Gambar 5.18</b> Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kota Pare-Pare Tahun 2017-2021 .....	90
<b>Gambar 5.19</b> Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kota Pare-Pare Tahun 2017-2021 .....	91

<b>Gambar 5.20</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kota Makassar Tahun 2017-2021 .....	94
<b>Gambar 5.21</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Tahun 2017-2021 .....	95
<b>Gambar 5.22</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kota Makassar Tahun 2017-2021 .....	96
<b>Gambar 5.23</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 .....	99
<b>Gambar 5.24</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 .....	100
<b>Gambar 5.25</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 .....	101
<b>Gambar 5.26</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 .....	104
<b>Gambar 5.27</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021 .....	105
<b>Gambar 5.28</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Gowa Tahun 2017-2021.....	106
<b>Gambar 5.29</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Maros Tahun 2017-2021 .....	109
<b>Gambar 5.30</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Maros Tahun 2017-2021 .....	110
<b>Gambar 5.31</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Maros Tahun 2017-2021 .....	111
<b>Gambar 5.32</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017-2021 .....	114
<b>Gambar 5.33</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017-2021 .....	115
<b>Gambar 5.34</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017-2021 .....	116
<b>Gambar 5.35</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Luwu Tahun 2017-2021 .....	119
<b>Gambar 5.36</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Luwu Tahun 2017-2021 .....	120
<b>Gambar 5.37</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Luwu Tahun 2017-2021 .....	121
<b>Gambar 5.38</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	124
<b>Gambar 5.39</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021 .....	125
<b>Gambar 5.40</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2021.....	126

<b>Gambar 5.41</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	129
<b>Gambar 5.42</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	130
<b>Gambar 5.43</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021 .....	131
<b>Gambar 5.44</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021 .....	134
<b>Gambar 5.45</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021 .....	135
<b>Gambar 5.46</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017-2021 .....	136
<b>Gambar 5.47</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kota Palopo Tahun 2017-2021 .....	139
<b>Gambar 5.48</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kota Palopo Tahun 2017-2021 .....	140
<b>Gambar 5.49</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kota Palopo Tahun 2017-2021 .....	141
<b>Gambar 5.50</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2021 .....	144
<b>Gambar 5.51</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2021 .....	145
<b>Gambar 5.52</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Bone Tahun 2017-2021 .....	146
<b>Gambar 5.53</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 .....	149
<b>Gambar 5.54</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 .....	150
<b>Gambar 5.55</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Soppeng Tahun 2017-2021 .....	151
<b>Gambar 5.56</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Wajo Tahun 2017-2021 .....	154
<b>Gambar 5.57</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Wajo Tahun 2017-2021 .....	155
<b>Gambar 5.58</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Wajo Tahun 2017-2021 .....	156
<b>Gambar 5.59</b>	Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Selayar Tahun 2017-2021 .....	160
<b>Gambar 5.60</b>	Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Selayar Tahun 2017-2021 .....	161
<b>Gambar 5.61</b>	Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Selayar Tahun 2017-2021 .....	162

<b>Gambar 5.62</b> Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2021 .....	165
<b>Gambar 5.63</b> Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2021 .....	166
<b>Gambar 5.64</b> Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2017-2021 .....	167
<b>Gambar 5.65</b> Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021 .....	170
<b>Gambar 5.66</b> Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021 .....	171
<b>Gambar 5.67</b> Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2021 .....	172
<b>Gambar 5.68</b> Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 .....	175
<b>Gambar 5.69</b> Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 .....	176
<b>Gambar 5.70</b> Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021 .....	177
<b>Gambar 5.71</b> Tren KUR Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2021 .....	180
<b>Gambar 5.72</b> Tren KUR Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2021 .....	181
<b>Gambar 5.73</b> Tren KUR Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2021 .....	182

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Jumlah UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 .....	22
<b>Tabel 1.2</b>	Jumlah Penyaluran KUR di Sulawesi Selatan Tahun 2021 .....	24
<b>Tabel 3.1</b>	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Jumlah aset dan omset.....	32
<b>Tabel 5.1</b>	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.....	56
<b>Tabel 5.2</b>	Data UMKM Menurut Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021.....	59
<b>Tabel 5.3</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Sidrap .....	65
<b>Tabel 5.4</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Barru.....	70
<b>Tabel 5.5</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Pinrang .....	76
<b>Tabel 5.6</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Pangkep.....	81
<b>Tabel 5.7</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Enrekang .....	86
<b>Tabel 5.8</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kota Pare-Pare .....	92
<b>Tabel 5.9</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Kota Makassar .....	97
<b>Tabel 5.10</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Takalar.....	102
<b>Tabel 5.11</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Gowa .....	107
<b>Tabel 5.12</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Maros.....	112
<b>Tabel 5.13</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Luwu Utara .....	117
<b>Tabel 5.14</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Luwu .....	122
<b>Tabel 5.15</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Tana Toraja .....	127
<b>Tabel 5.16</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Luwu Timur .....	132
<b>Tabel 5.17</b>	Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Toraja Utara .....	137

<b>Tabel 5.18</b> Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kota Palopo .....	142
<b>Tabel 5.19</b> Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Bone .....	147
<b>Tabel 5.20</b> Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Soppeng .....	152
<b>Tabel 5.21</b> Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Wajo .....	157
<b>Tabel 5.22</b> Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Selayar.....	163
<b>Tabel 5.23</b> Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Jeneponto .....	168
<b>Tabel 5.24</b> Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Bantaeng .....	173
<b>Tabel 5.25</b> Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Bulukumba.....	178
<b>Tabel 5.26</b> Uji Korelasi KUR terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Sinjai.....	183

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyat dalam pembangunan suatu negara. Sejauh ini, keberadaan UMKM di Indonesia memegang perananan penting dalam pembangunan ekonomi, sehingga keberadaan UMKM di Indonesia mempunyai peranan penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerja relatif tinggi dan kebutuhan modal untuk berinvestasi kecil. Rendahnya tingkat investasi serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa yang akan datang dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) tahun 2018, Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi

UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar.

Begitupun pada masa Pandemi Covid-19 telah membawa perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang negatif atau kontraksi. Kontraksi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk mencegah Covid-19. UMKM mampu mengadaptasikan bisnisnya dengan produk-produk inovasi dan produk tersebut dijual dengan memanfaatkan *marketing digital* (Rosita, 2020). Hal inilah yang membuktikan UMKM mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam perekonomian.

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2021, diketahui jumlah UMKM Provinsi Sulawesi Selatan terdata mencapai 1.598.550 Unit. UMKM umumnya berbasis sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor. Sehingga hasilnya mampu diekspor karena keunikannya bagi pembangunan UMKM di yakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional (Widyaresti, 2012). Jumlah UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	Tahun 2021			Jumlah UMKM
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
Kep. Selayar	19.593	1.015	32	20.640
Bulukumba	93.807	4.577	136	98.520
Bantaeng	55.399	2.472	30	57.901
Jeneponto	154.857	5.634	58	160.549
Takalar	129.266	6.982	68	136.316
Gowa	102.126	13.335	147	115.608
Sinjai	59.874	2.931	48	62.853
Maros	26.026	4.763	92	30.881
Pangkep	68.247	4.535	77	72.859
Barru	21.800	2.243	40	24.083
Bone	58.158	8.206	105	66.469
Soppeng	22.063	3.851	58	25.972
Wajo	42.800	7.622	158	50.580
Sidrap	113.302	4.240	61	117.603
Pinrang	36.524	2.299	48	38.871
Enrekang	23.819	3.085	46	26.950
Luwu	32.780	1.779	45	34.604
Tana Toraja	32.498	4.067	15	36.580
Luwu Utara	45.400	5.131	86	50.617
Luwu Timur	32.792	4.183	89	37.064
Toraja Utara	33.517	3.280	99	36.896
Makassar	174.318	35.802	1.447	211.567
Pare-pare	27.831	3.216	96	31.143
Palopo	49.746	3.574	104	53.424
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>1.456.543</b>	<b>138.822</b>	<b>3.185</b>	<b>1.598.550</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sulsel

Kuantitas UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi alasan mengapa UMKM kebal terhadap krisis. UMKM menjadi usaha yang dapat bertahan dalam kondisi krisis disebabkan oleh sifat UMKM yang sangat fleksibel karena mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya bersifat birokratis. Kecepatan reaksi bisnis ini terhadap segala perubahan seperti pergeseran selera konsumen, trend, produk baru dan lain sebagainya cukup tinggi, sehingga bisnis skala kecil ini lebih kompetitif.

Masalah yang menghambat perkembangan UMKM adalah kekurangan akses permodalan. Tanpa adanya modal yang cukup, tentunya akan menghambat aktivitas produktivitas dari UMKM. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM dalam hal permodalan. Maka modal usaha bagi kelompok UMKM merupakan permasalahan yang cukup pelik. Tidak hanya menghambat kelangsungan bisnis tetapi bisa menjadi penyebab gagalnya usaha yang tengah dirintis.

Dengan adanya kondisi seperti itu, maka pemerintah berupaya melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu sasaran program PEN adalah menggerakkan UMKM. Salah satu program yang dibuat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program KUR merupakan bantuan modal yang dapat diperoleh dari salah satu perbankan yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR, agar dapat mempercepat akses keuangan ke daerah-daerah. Dapat kita ketahui para pelaku usaha UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini semakin lama makin bertumbuh dengan

pesat. Hal tersebut dapat di lihat secara langsung di lapangan dengan data teruji pada Tabel 1.2 .

Berdasarkan Tabel 1.2 Provinsi Sulawesi Selatan terbagi atas 5 wilayah yaitu: Wilayah Selatan, Wilayah Mamminasata, Wilayah Ajatappareng, Wilayah Bosowa, dan Wilayah Luwu Raya dan Toraja. Dengan pembagian wilayah ini, maka dapat dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui kondisi umum peran KUR dalam mencapai targetnya di masing-masing wilayah.

**Tabel 1. 2 Jumlah Penyaluran KUR di Sulawesi Selatan Tahun 2021**

NO.	Kabupaten/Kota	Penyaluran KUR (Juta)	Share (%)	Wilayah
1	Kep. Selayar	102.520	0.54%	Wilayah Selatan
2	Bulukumba	883.173	5.91%	
3	Jeneponto	351.314	2.32%	
4	Bantaeng	292.056	1.86%	
5	Sinjai	965.753	6.74%	
6	Takalar	579.837	3.35%	Wilayah Mamminasata
7	Gowa	948.742	5.77%	
8	Maros	486.570	3.16%	
9	Makassar	1.948.343	12.11%	Wilayah Ajatappareng
10	Pangkep	438.722	2.82%	
11	Barru	468.913	3.22%	
12	Sidrap	972.768	6.39%	
13	Enrekang	431.731	2.84%	
14	Pinrang	898.316	5.49%	
15	Pare-Pare	470.804	2.51%	Wilayah Bosowa
16	Bone	1.259.089	8.29%	
17	Soppeng	352.861	2.24%	
18	Wajo	1.078.966	6.57%	Wilayah Luwu Raya dan Toraja
19	Luwu	676.050	4.59%	
20	Tana Toraja	262.441	1.68%	
21	Luwu Utara	691.675	4.06%	
22	Luwu Timur	733.042	4.84%	
23	Toraja Utara	198.237	1.20%	
24	Palopo	292.056	1.48%	
<b>Total</b>		<b>15.783.979</b>	<b>100.00%</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>

Sumber : OJK Regional 6 Sulampua

Jika dilihat pada Tabel 1.2, jumlah penyaluran KUR di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar Rp 15.783.979,- (Juta). Hal ini menunjukkan tingginya jumlah penyaluran perbankan terhadap UMKM sebagai bantuan modal usaha.

Pada dasarnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada pelaku UMKM atau koperasi yang *feasible* tapi belum *bankable*. *Feasible* maksudnya adalah usaha tersebut memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.

Beberapa usaha rakyat yang diharapkan menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri adalah meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, dan kehutanan. Dengan adanya layanan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akhirnya diharapkan dapat mengakses dan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 bahwa pemberian bantuan modal kredit dari perbankan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang melakukan kegiatan usaha produktif dan mewujudkan pembangunan sektor riil, agar mampu memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Peran dari perbankan sendiri dalam hal ini adalah menyediakan bantuan dalam bentuk pinjaman modal bagi pelaku UMKM dengan menyalurkan dana dalam bentuk perkreditan. Ada beberapa bank yang ditunjuk untuk menyalurkan

KUR di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Bank Sulselbar, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BSI dan Bank Sinarmas.

Dengan berbagai upaya pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk terus mendukung keberadaan dan kemajuan UMKM dalam hal bantuan atas modal, maka dampak yang ditimbulkan dari adanya bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap perkembangan UMKM dianggap penting untuk diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Indikator Ekonomi di Sulawesi Selatan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan antara KUR dengan tingkat pengangguran di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimana hubungan antara KUR dengan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan ?
3. Bagaimana hubungan antara KUR dengan tingkat pendapatan per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah

1. Menganalisis hubungan antara KUR dengan tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis hubungan antara KUR dengan kemiskinan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menganalisis hubungan antara KUR dengan pendapatan per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan, literatur khususnya bagi Mahasiswa/I yang melakukan penelitian, sehingga dapat membandingkan teori-teori dengan kenyataan dilapangan, khususnya tentang hubungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan berbagai indikator ekonomi makro.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi kepada pemerintah dan pihak berkepentingan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya mengenai hubungan antara Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan pendapatan per kapita di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Kredit**

Dalam kehidupan masyarakat kredit bukanlah suatu hal yang baru, karena kredit sudah melembaga di tengah-tengah masyarakat. Dalam bahasa latin kredit disebut "*Credere*" yang artinya percaya. Maksud si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat di percaya, maka sebelum kredit diberikan, terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau mengalami macet kredit. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak

dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya kebanjiran atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dengan pengertian kredit di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara berangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (Bunga) yang telah ditetapkan. Tetapi ada unsur yang harus mendukung untuk memungkinkan terjadinya kredit.

Menurut Kasmir (2012), ada unsur-unsur dalam kredit dalam pemberian kredit adalah:

a) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikururkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikururkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

b) Kesepakatan

Disamping unsur percaya dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

c) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d) Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e) Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil

## **2.2 Kredit UMKM**

Dalam bentuk dukungan permodalan terhadap pelaku UMKM, Lembaga keuangan dan pemerintah telah membuat kebijakan yang dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Salah satu bentuk dukungannya yaitu program kredit UMKM. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan kredit UMKM adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sedangkan Kredit UMKM menurut Bank Indonesia dalam adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berikut Tabel 2.1 menunjukkan kriteria UMKM yang berlaku berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

**Tabel 3.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**  
berdasarkan Jumlah aset dan omset

No.	Usaha	Kriteria Asset	Kriteria Omset
1	Usaha Mikro	Maks. Rp 50 Juta	Maks. Rp 300 Juta
2	Usaha Kecil	Rp 50 Juta –Rp 500 Juta	Rp 300 Juta – Rp 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	Rp 500 Juta – Rp 10 milyar	Rp 2,5 Milyar – Rp 50 milyar

Sumber : Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

### 2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Beberapa waktu belakangan ini lembaga keuangan maupun pemangku kebijakan semakin merespon membantu pelaku UMKM dalam memberikan dukungan permodalan bagi pelaku UMKM dalam bentuk kredit dengan bunga rendah. Selain program kredit UMKM, Pemerintah juga telah membuat produk Kredit dengan penjaminan tertentu yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit KUR merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa kebijakan pemberian kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha, atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan belum cukup.

Pemerintah fokus memberikan kredit KUR pada UMKM, karena UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar yang menopang perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan

penyediaan berbagai jasa. Sehingga berani memberikan produk Kredit KUR dengan Bunga yang rendah.

Pemberian KUR kepada pelaku UMKM bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan Bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan.

Harapannya jika UMKM maju, maka secara tidak langsung akan mendorong perekonomian, menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan. Adapun ketentuan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh bank (feasible) namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank (bankable) dengan ketentuan:
  1. Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi.
  2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan

sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijanjikan antara Bank pelaksana dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersangkutan.
- b) KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
1. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
  2. Untuk kredit diatas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 165 efektif pertahun.
  3. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- c) Proses penyaluran kredit KUR dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu :
1. Secara langsung maksudnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat langsung mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana.
  2. Secara tidak langsung maksudnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Lembaga

Keuangan Mikro dan KSP/USP koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerja sama dengan bank pelaksana.

## 2.4 Pengangguran

Jumlah penduduk yang terus bertambah mempunyai keterkaitan dengan perkembangan angkatan kerja. Jika semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula pertambahan tenaga kerja dan angkatan kerja. Dengan penduduk yang tinggi, jika tidak di imbangi dengan lapangan pekerjaan maka akan mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Biasanya kehilangan pekerjaan bagi sebagian orang merupakan penurunan suatu standar dalam kehidupan. Sehingga pengangguran menjadi salah satu topik yang penting dan sering diperbincangkan dalam mengkaji kebijakan pemerintah yang akan ditawarkan demi terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw,2000).

Menurut Nanga (2001:253) pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang di hadapi tidak hanya di Negara sedang berkembang, melainkan di Negara maju secara umum pengangguran itu ada. Pengangguran di definisikan sebagai keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif sedang mencari pekerjaan.

Pengangguran juga dapat diartikan seseorang yang sudah di golongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi belum dapat memperoleh pekerjaan yang di inginkan. Sedangkan bagi mereka yang aktif sekolah (mahasiswa), ibu rumah tangga, anak orang kaya yang

sudah dewasa tetapi belum bekerja, tidak di golongkan sebagai penganggur karena mereka tidak secara aktif mencari pekerjaan (Sukirno, 2000:472).

Adapun beberapa teori-teori yang menjelaskan mengenai pengangguran yaitu :

#### 1. Teori Klasik

Teori Klasik mengemukakan pandangan bahwa pengangguran mampu dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso. 2004).

Oleh sebab itu, jika kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Tohar. 2000).

#### 2. Teori Keynes

Dalam upaya menanggapi masalah pengangguran, Teori Keynes berlawanan dengan Teori klasik. Menurut Teori Keynes bahwa masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi.

Menurut Teori Keynes, Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan

daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, Teori Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005)

Dampak buruk dari angkatan kerja dan pengangguran yang terus meningkat dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan atau penghasilan masyarakat. Yang pada akhirnya mengurangi kemakmuran yang di capai seseorang, kemakmuran masyarakat yang semakin menurun akibat dari pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang masyarakat untuk terjebak dari kemiskinan (Sukirno, 2004).

Sedangkan menurut Nanga (2001:260) dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat maupun perekonomian adalah :

1. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin di capainya. Sehingga apabila kesejahteraan masyarakat rendah maka akan timbul masalah sosial, misalnya kemiskinan, ketimpangan, kesengsaraan.
2. Pengangguran menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat di pertahankan apabila keterampilan tersebut di gunakan dalam praktek. Pengangguran dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan tingkat keterampilan pekerja menjadi merosot.
3. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Kehidupan penganggur harus di biayai dengan investasi atau tabungan masa

lalu atau pinjaman. Keadaan ini bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga menjadi kurang harmonis.

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan :

1. Pendekatan Angkatan Kerja (Labour force approach)

Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

2. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (Labour utilization approach)

- a) Bekerja penuh (employed) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
- b) Setengah menganggur (underemployed) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

## 2.5 Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2006) Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di suatu daerah tertentu, individu yang hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

Seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian daerah tersebut. Menurut Amarta sen (1987) dalam Haughton dan Shahidur (2012) Kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan di anggap sebagai sebuah fenomena multidimensional.

Menurut teori Nurkse (dalam Kuncoro 1997:107) Kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan Sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah. Akibatnya mengakibatkan pendapatan yang di terima rendah serta pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. Jika pendapatan terus menurun mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal.

Sedangkan dari sisi ekonomi menurut dari sisi Sharp (1996) penyebab kemiskinan dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang;
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia;
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

## **2.6 Pendapatan Per Kapita**

Pendapatan perkapita menurut Sadono Sukirno yaitu besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk negara pada tahun tersebut (Sukirno,2004).

Begitupun dengan pendapat (Tristanto, Arisman, & Fajriana, 2013) bahwa Pendapatan perkapita merupakan semua pendapatan dan semua jumlah penduduk di suatu wilayah negara negara. Pendapatan per kapita yang didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita dapat dipakai untuk melihat tingkat kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan melakukan bandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu negara secara rata-rata telah meningkat. Pendapatan perkapita yang meningkat merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan penduduk telah meningkat.

Maka semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya; besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara. Dimana alat ukur yang dipakai untuk mengukur kemakmuran adalah output nasional perkapita. Nilai output perkapita diperoleh dengan cara membagi besarnya output nasional dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan.

Menurut Rasyidi (2010:166), Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita adalah sebagai berikut :

1. Permintaan agrerat dan penawaran agregat

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah seluruh barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam tingkat harga.

2. Konsumsi dan tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam satu tahun. Sedangkan tabungan bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Tabungan, konsumsi, dan pendapatan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan, dimana semakin besar konsumsi dan tabungan maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh oleh seseorang.

3. Investasi

Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting pengeluaran agrerat.

## **2.7 Tinjauan Empiris dan Hasil penelitian**

Menurut Mudassir (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran KUR pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba dengan cukup memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan usaha masyarakat, namun tidak terlepas juga dari faktor yang mendukung antara lain sosialisasi dan data. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu proses pencairan, pola pikir dan pemahaman dalam proses pelaksanaannya.

Riska Widianti (2015) dalam penelitiannya menunjukan penyaluran KUR pada BRI Unit Malausma telah efektif dalam memberdayakan UMKM di Desa Banyusari Kecamatan Malausma. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penilaian efektivitas KUR dilihat dari tujuannya yaitu meningkatkan akses UMKM di Desa Banyusari Kecamatan Malausma kepada sumber kredit yaitu BRI Unit Malausma dengan mudah dan dapat membantu memberdayakan usaha mereka menjadi lebih berkembang.

Imiati Iztihar (2018) dalam penelitiannya menunjukan penyaluran dana KUR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengembangan usaha kecil dilihat dari bertambahnya jumlah UMKM, tenaga kerja UMKM dan nilai output UMKM serta meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Akan tetapi, memberikan pengaruh negatif signifikan pada kemiskinan.

Nurul Azizah (2018) dalam penelitiannya menunjukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberian Kredit KUR BRI di Situbondo mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi

secara makro dan merata. Modal/kredit tersebut dapat digunakan oleh pengusaha kecil untuk memperluas dan mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha kecil tersebut.

Windi Andini (2022) dalam penelitiannya tentang Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. KUR mampu meningkatkan laju perekonomian sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan dengan KUR memberikan tambahan modal dan investasi sehingga mendorong tumbuhnya usaha manufaktur dan sektor rill, dengan meningkatkan sektor rill maka pendapatan nasional meningkat, dengan pendapatan per kapita yang meningkat. Maka secara otomatis akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

## **BAB III**

### **KERANGKA PIKIR**

#### **1.1 Kerangka Konsep**

Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan pada teori dan studi empiris yang telah dikemukakan sebelumnya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pengangguran, Kemiskinan, Pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Indikator ekonomi ini akan lebih mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat perlu dilakukan untuk mengetahui apakah program tersebut telah berjalan efektif atau tidak. Sebuah program dikatakan berhasil jika program tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan proses yang telah ditentukan dan mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui bantuan yang di berikan pemerintah dari berbagai perbankan yang telah menyalurkan KUR.

Dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu sasaran program PEN yaitu menggerakkan UMKM. Dengan Kuantitas UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan ini mempunyai potensi dan peranan dalam pembangunan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pembangunan manusia.

Salah satu program yang dibuat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR merupakan bantuan modal yang dapat diperoleh dari salah satu perbankan yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR, agar dapat mempercepat akses keuangan ke daerah-daerah. Tujuan kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan modal kredit dari perbankan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang melakukan kegiatan usaha produktif

Hal ini juga didukung oleh teori pengangguran menurut Sadono Sukirno dalam Nugroho (2015) bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat dimana dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur maka akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Sehingga pengangguran berdampak pada berkurangnya pendapatan pada masyarakat.

Pendapatan masyarakat mampu mencapai titik maksimal jika didukung dengan penggunaan tenaga kerja penuh dapat tercapai. Pengangguran yang ada dalam masyarakat dapat menghambat pendapatan masyarakat mencapai titik maksimal, dengan demikian menurunkan kemakmuran yang harusnya mampu dicapai. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Semakin banyak orang yang menganggur maka angka kemiskinan pun meningkat

Jika pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan selalu terjadi kekacauan politik dan sosial sehingga berdampak buruk bagi kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, pengangguran memiliki hubungan terhadap kemiskinan, karena semakin banyak masyarakat yang menganggur maka cenderung akan semakin banyak kemiskinan dalam masyarakat.

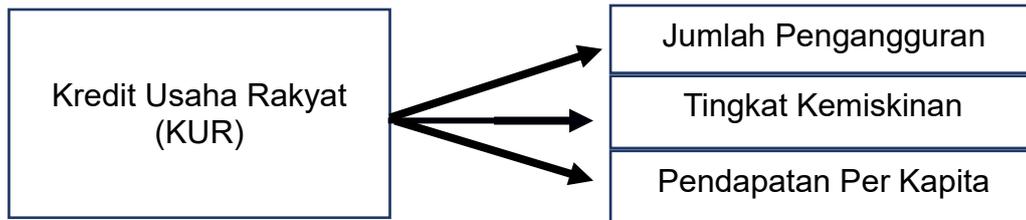
Selanjutnya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja secara teoritis di antaranya ditunjukkan oleh Hukum Okun. Menurut Hukum Okun, terdapat relasi negatif antara pengangguran dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal ini Okun menyatakan jika terjadi penurunan dalam pengangguran sebesar 1 %, maka akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan PDB mendekati 2 persen. Dengan kata lain, Hukum Okun menyatakan apabila PDB meningkat sebesar 2%, maka akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kemudian menurunkan angka pengangguran sebesar 1% (Mankiw, 2007). Sedangkan menurut Solow dalam Mankiw (2000) bahwa dengan meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan yang dihasilkan oleh pekerja akan menaikkan pendapatan per kapita di masing-masing wilayah. Setelah itu dapat di ukur melalui data gini rasio untuk mengukur pemerataan distribusi pendapatan yang masuk di setiap daerah. Biasanya dilihat dengan pembagian pendapatan antar daerah seperti seperti kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengembangkan sebuah model penelitian. Untuk memudahkan kegiatan

penelitian yang akan dilakukan dan untuk memperjelas kerangka pikir penelitian, maka hubungan-hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Konsep dari penelitian ini seperti pada gambar 3.1 berikut:



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian**